

Pelatihan Kesadaran dan Keterampilan Literasi Digital Bagi Calon PPPK Paruh Waktu BPBD Kota Pekalongan

Meidy Prasetyo Utomo¹, Ratna Kurniatsih², Putri Yula Akromah³, Mohammad Nabil Hizbullah⁴,
Muhammad Ridho Ardhan⁵ Muhammad Shofiyuddin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

e-mail co Author: *¹meidy.exe@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan Digital yang dicanangkan dalam Visi Indonesia Digital 2045 menuntut seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk memiliki kompetensi digital. Tetapi dalam kenyataannya ada kesenjangan keterampilan, terutama bagi pegawai yang bekerja dominan di lapangan. Survei awal pada calon PPPK Paruh Waktu di BPBD Kota Pekalongan menunjukkan bahwa 28% belum pernah menggunakan komputer dan 50% belum bisa menggunakan aplikasi olah kata. Metode yang digunakan adalah pelatihan tatap muka dengan materi berbasis 4 Pilar Literasi Digital (Cakap, Aman, Budaya, Etika) dan fokus pada keterampilan dasar. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan dan observasi. Hasilnya, 76,67% peserta merasa pengetahuan digital bertambah dan merasa lebih siap bekerja. Secara kualitatif, peserta sangat antusias dan bahkan meminta pelatihan lanjutan dengan durasi yang lebih panjang menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi.

Kata Kunci : Literasi Digital, PPPK, Pemerintahan Digital

PENDAHULUAN

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) menyusun sebuah Visi Indonesia Digital 2045 sebagai fokus arah kebijakan nasional untuk meraih kapasitas dan penguasaan teknologi digital ke depan. Untuk itu, Indonesia harus melakukan persiapan dan perencanaan di berbagai sektor dengan orkestrasi seluruh komponen pembangunan digital, yang disokong salah satunya oleh Pemerintahan Digital yang modern dan responsif. Digitalisasi merupakan salah satu kunci untuk mempercepat inovasi dan memperkuat daya saing bangsa di kancah global.



Gambar 1. Kerangka Visi Indonesia Digital 2045 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023)

Keberhasilan Pemerintahan Digital yang sedang disusun regulasinya oleh Kementerian PAN&RB (Tumangger, 2025), sebagai salah satu pilar Visi Indonesia Digital 2045 bergantung kepada kesiapan dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak utama. Penerapan *e-government* atau Pemerintah Indonesia menyebutnya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bukan sekedar tentang infrastruktur teknologi canggih, tetapi menuntut kompetensi digital dari setiap ASN (Sinaga & Arianto, 2025). Dari level pegawai paling dasar hingga pengambil kebijakan strategis, harus menguasai teknologi digital untuk memastikan roda pemerintahan terus berputar selaras dengan tuntutan zaman. Salah satu aspek dalam pengembangan kompetensi ASN adalah peningkatan kompetensi (Sutalhis & Novaria, 2024).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem kepegawaian di pemerintahan mulai mengenal konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian sebagai upaya untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, Kementerian PAN&RB mengeluarkan Keputusan Menteri PAN&RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang PPPK Paruh Waktu.

Di sinilah letak permasalahan yang ditemui, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki calon PPPK Paruh Waktu yang sebagian besar pekerjaannya bersifat kegiatan lapangan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya paparan terhadap kegiatan administratif yang mengandalkan perangkat dan aplikasi digital. Berdasarkan survei awal untuk menentukan materi pelatihan, didapatkan bahwa 28% calon peserta pelatihan belum pernah menggunakan komputer, dan 50% tidak bisa menggunakan aplikasi olah kata.

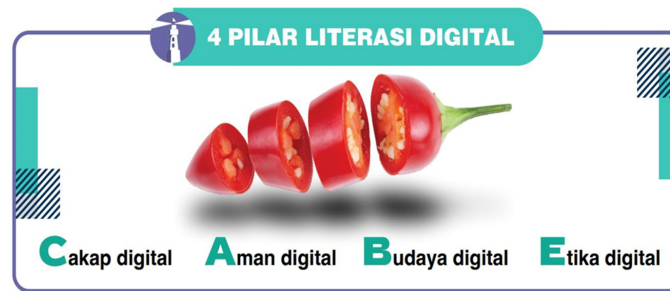
Kesenjangan kompetensi digital ini memunculkan risiko. Selain risiko keamanan siber seperti penipuan dan penyebaran hoaks (Estiningsih, 2023), kesenjangan ini secara langsung dapat mengganggu mereka untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang kini terdigitalisasi. Sehingga, diperlukan intervensi untuk membangun fondasi literasi digital bagi pada calon PPPK tersebut.

Menurut Martin (2006), literasi digital adalah suatu kemampuan untuk berinteraksi dengan alat dan infrastruktur elektronik. Namun, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan, tetapi juga sikap untuk dapat secara maksimal memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu produktivitas dalam bekerja, belajar atau aktivitas lainnya (Estiningsih, 2023).

Pada tahun 2021, kolaborasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menghasilkan sebuah kerangka literasi digital untuk meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dengan positif. Kerangka literasi tersebut berisi 4 pilar yaitu: Cakap Digital (*Digital Skill*), Aman Digital (*Digital Safety*), Budaya Digital (*Digital Culture*), dan Etika Digital (*Digital Ethics*).

Cakap Digital atau *Digital Skill* adalah kemampuan seseorang untuk mengoperasikan teknologi digital (Monggilo dkk., 2021), antara lain pengoperasian dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, sebagai dasar dari kompetensi literasi digital. Aman Digital atau *Digital Safety* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan layanan digital baik secara daring maupun luring secara aman dan nyaman (Adikara dkk., 2021). Budaya Digital atau *Digital Culture* adalah kemampuan individu untuk membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mengedepankan toleransi untuk menjaga ruang siber yang aman dan produktif (Estiningsih, 2023). Pilar yang terakhir yaitu, Etika Digital atau

Digital Ethics, yaitu kemampuan individu untuk mengembangkan sikap dan perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari di ruang siber (Estiningsih, 2023).



Gambar 2. Ilustrasi 4 Pilar Literasi Digital

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung implementasi Visi Indonesia Digital 2045, salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi digital. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi bagian nyata dari kontribusi akademisi dalam membentuk aparatur yang siap menghadapi transformasi digital pemerintah.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pondasi kompetensi digital bagi para Calon PPPK Paruh Waktu BPBD Kota Pekalongan, untuk mempersiapkan mereka menghadapi kompleksitas tugas dan tantangan di lingkungan kerja yang semakin terdigitalisasi. Tujuan ini sejalan dengan pandangan Spante dkk. (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi digital tidak hanya merupakan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan untuk memecahkan masalah menggunakan teknologi, menganalisis kebutuhan dan solusi digital yang tepat, serta menggunakan teknologi untuk mendorong inovasi baru. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam era pemerintahan digital.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didahului dengan identifikasi kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan untuk meningkatkan kapasitas digital Calon PPPK Paruh Waktu nya. Berdasarkan survei awal, peserta yang akan diidentifikasi akan mengikuti pelatihan berjumlah 33 orang. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan lokasi yaitu di Dinas Kominfo Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kedekatan lokasi kantor BPBD dengan Kantor Dinas Kominfo serta kebutuhan prasarana seperti komputer.

Materi pelatihan dirancang tidak hanya berfokus pada aspek teknis/keterampilan penggunaan perangkat, tetapi juga mencakup aspek keamanan (*safety*), budaya, dan etika, menggunakan kerangka 4 Pilar Literasi Digital yakni Cakap Digital, Aman Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital.

Kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa *knowledge sharing* atau pelatihan dilakukan dengan membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok, memperhatikan kompetensi dasar setiap calon peserta dan ketersediaan sarana pelatihan. Masing-masing kelompok dilatih selama 1 (satu) hari. Setiap akhir pelatihan, peserta diminta untuk mengisi survei kepuasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang menyediakan bantuan sarana

dan prasarana dalam pelaksanaan program ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan bahwa peserta pelatihan akan memiliki kesiapan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data OECD (*Public Governance and Administration Modernisation*, t.t.), pelayanan publik dan digitalisasi adalah 2 aspek tertinggi dalam menghadirkan pemerintah yang lebih responsif. Hal ini selaras dengan transformasi digital pemerintah yang dilakukan sebagai salah satu bagian penting transformasi Indonesia yang merupakan amanat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Republik Indonesia, 2024).

Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang dapat beradaptasi pada digitalisasi layanan di pemerintahan. Tercapainya sumber daya manusia unggul tersebut dapat dipenuhi melalui pengembangan kompetensi salah satunya dengan pelatihan.

Pelaksanaan pelatihan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 22 - 23 Oktober 2025, bertempat di ruang *Informatics Learning Center* (ILC) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dengan peserta Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari BPBD berjumlah 31 orang dan dibuka oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan.



Gambar 3. Pembukaan pelatihan oleh Kabid Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo

Berdasarkan hasil survei kepuasan yang diisi oleh peserta pada setiap akhir pelatihan dan diisi oleh 30 peserta, didapatkan data bahwa pelatihan diikuti oleh 26 peserta laki-laki (83,87%) dan 5 peserta perempuan (16,13%), yang paling banyak berasal dari generasi millennial (66,67%) sebagaimana Tabel 1 dengan tingkat pendidikan terakhir terbanyak SMA/ sederajat (73,33%) sebagaimana Tabel 2.

Tabel 1. Data Peserta Berdasarkan Tahun Lahir

Tahun Lahir	Jumlah	%
1965 – 1982	4	13,33
1981 – 1996	20	66,67
1997 – 2012	6	20

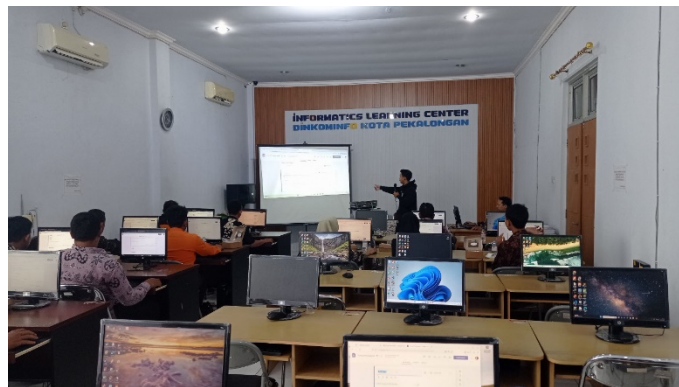
Tabel 2. Data Peserta Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
SD/ sederajat	2	6,67
SMA/ sederajat	22	73,33
DIV/ S1	6	20

Pelatihan literasi digital kepada calon PPPK Paruh Waktu ini menggunakan Kerangka literasi tersebut berisi 4 pilar diawali dengan materi tentang Aman Digital (Digital Safety), Budaya Digital (Digital Culture), dan Etika Digital (Digital Ethics) yang dikemas singkat sebagai pengantar, dilanjutkan dengan materi Cakap Digital (Digital Skill) dengan pelatihan dasar penggunaan komputer, manajemen file, persuratan online, dan aplikasi olah kata.



Gambar 4. Penyampaian materi oleh narasumber



Gambar 5. Penyampaian materi oleh narasumber

Kegiatan pelatihan ini secara umum berhasil meningkatkan keterampilan dan kesiapan peserta dalam bekerja. Berdasarkan hasil survei kepuasan, sebanyak 76,67% peserta merasa pengetahuan literasi digital mereka bertambah dan merasa lebih siap untuk bekerja di unit kerja masing-masing setelah mengikuti pelatihan. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis pendekatan empat pilar literasi digital efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan kerja aparatur. Hal ini sesuai dengan penelitian Spante dkk. (2018) yang menekankan pentingnya pembelajaran proaktif literasi digital untuk membentuk kompetensi digital.



Gambar 6. Suasana kegiatan pelatihan



Gambar 7. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Pekalongan bersama Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kota Pekalongan



Gambar 8. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Pekalongan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Meskipun didominasi oleh generasi millennial yang sering dianggap sebagai *digital native*, data dari survei awal (ketidakmampuan mengoperasikan komputer) menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak selalu tepat. Kompetensi digital tidak selalu terbentuk otomatis berdasarkan usia, tetapi melalui paparan dan kebutuhan.

Berdasarkan observasi, menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Peserta sangat aktif dalam mengikuti materi dalam pelatihan bahkan meminta tambahan materi kolaborasi online menggunakan Google Workspace. Peserta juga merasa bahwa waktu yang disediakan terlalu pendek dan memberikan saran untuk dilaksanakan pelatihan kembali di lain kesempatan dengan waktu yang lebih panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan ini tidak hanya

berhasil meningkatkan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya teknologi untuk menunjang pekerjaan.

KESIMPULAN

Pelatihan literasi digital bagi calon PPPK Paruh Waktu BPBD Kota Pekalongan telah berhasil dilaksanakan dan secara efektif menjawab permasalahan kesenjangan keterampilan dasar yang teridentifikasi. Penggunaan kerangka 4 Pilar Literasi Digital dengan fokus utama pada Cakap Digital terbukti mampu meningkatkan kesiapan kerja peserta, di mana 76,67% merasa pengetahuannya bertambah dan lebih siap bekerja. Temuan penting dari pengabdian ini adalah tingginya antusiasme dan permintaan proaktif untuk pelatihan lanjutan dari peserta. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya mengisi kesenjangan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan mengubah pola pikir peserta dari yang awalnya tidak familiar menjadi penasaran dan ingin belajar lebih jauh. Pengabdian ini merekomendasikan adanya pelatihan digital berjenjang dan berkelanjutan bagi seluruh ASN, terlepas dari status usia atau fungsi pekerjaan, untuk memastikan keberhasilan transformasi menuju pemerintahan digital. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi ASN, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi dalam mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif dan berkelanjutan sesuai Tri Darma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal

- Estiningsih, M. (2023). Indonesia cakap digital melalui kegiatan literasi digital bagi seluruh aparatur sipil negara (asn). *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 695–704. <https://doi.org/10.59004/jmas.v1i5.277>
- Martin, A. (2006). A european framework for digital literacy. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 1(2), 151–161. <https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2006-02-06>
- Sinaga, P. R., & Arianto, B. (2025). Pengembangan kompetensi digital ASN di badan kepegawaian daerah kepulauan riau: Strategi dan tantangan implementasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 74–83. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.444>
- Spante, M., Hashemi, S. S., Lundin, M., & Algers, A. (2018). Digital competence and digital literacy in higher education research: Systematic review of concept use. *Cogent Education*, 5(1), 1519143. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1519143>
- Sutalhis, M., & Novaria, E. (2024). Literasi digital dan pelayanan publik yang baik. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 4(1), 17–23. <https://doi.org/10.51878/academia.v4i1.2812>

Artikel dari Internet

- Adikara, G. J., Kurnia, N., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto, X. A., Setyaningsih, F. D., & Astuti, S. I. (2021). *Modul Aman Bermedia Digital*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Visi Indonesia Digital 2045. Kementerian Komunikasi dan Informatika. <https://digital2045.id/>

- Monggilo, Z. M. Z., Kurnia, N., Wirawanda, Y., Desi, Y. P., Sukmawati, A. I., Anwar, C. R., Wenerda, ndah, & Astuti, S. I. (2021). *Modul Cakap Bermedia Digital*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Public governance and administration modernisation*. (t.t.). Oecd. Diambil 27 Oktober 2025, dari <https://www.oecd.org/en/topics/public-governance-and-administration-modernisation.html>
- Republik Indonesia. (2024, September 13). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*.
- Tumangger, D. (2025, Juli 31). *Rapat pembahasan rancangan perpres tentang pemerintah digital*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/rapat-pembahasan-rancangan-perpres-tentang-pemerintah-digital>